

**GRATIFIKASI PADA PELAYANAN PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN  
DI INSTANSI PEMERINTAH**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Sosiologi**



**Disusun oleh :**

**KHOIRUN NISAK  
NIM : 201810270211008**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Juni 2020**

# GRATIFIKASI PADA PELAYANAN PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN DI INSTANSI PEMERINTAH

Diajukan oleh :

**KHOIRUN NISAK**  
201810270211008



Telah disetujui

Pada hari/tanggal Senin, 15 Juni 2020

Pembimbing Utama

**Dr. Vina Salviana D S, M.Si**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Achmad Habib, M.A**

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi

**Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**KHOIRUN NISAK**

201810270211008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Senin/ 15 Juni 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.Vina Salviana D S, M.Si  
Sekretaris : Dr. Achmad Habib, M.A  
Penguji I : Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si  
Penguji II : Dr. Fauzik Lendriyono

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **KHOIRUN NISAK**  
NIM : **201810270211008**  
Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **GRATIFIKASI PADA PELAYANAN PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN DI INSTANSI PEMERINTAH** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juni 2020  
Yang menyatakan,



**KHOIRUN NISAK**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga hanya milik Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Gratifikasi Pada Pelayanan Pengurusan Izin Lingkungan di Instansi Pemerintah”**. Semoga Allah SWT memberikan manfaat atas ilmu pengetahuan ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-2 di Program Studi Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa selama perkuliahan maupun sampai dengan penulisan tesis ini tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal jika tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan sabar membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr.Vina Salviana D S, M.Si dan Dr. Achmad Habib, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingannya yang sangat berharga hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si dan Dr. Fauzik Lendriyono serta Dr. Wahyudi, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan tesis ini.
3. Akshanul In'am, Ph. D beserta staff TU Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas segala bantuan yang diberikan.
4. Suami dan anak Tercinta, Kedua Orang Tua beserta seluruh keluarga tersayang saya untuk semua do'a, dukungan, semangat dan kasih sayang yang tak pernah berhenti tercurah untuk saya hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
5. Pemilik Perusahaan beserta rekan – rekan kerja yang telah memberikan bantuan dan yang senantiasa memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk saya.
6. Teman-teman Pascasarjana Sosiologi Angkatan 2018 yang senantiasa memberi semangat dan motivasi untuk saya.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga dengan amal dan budi baik yang diberikan kepada penulis semuanya mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini.

Malang, 15 Juni 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGUJI

### SURAT PERNYATAAN

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTARCT.....</b>	<b>ix</b>

<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>B. KAJIAN LITERATUR.....</b>	<b>5</b>
1. Penelitian Terdahulu.....	5
2. Tinjauan Pustaka .....	6
3. Landasan Teori.....	9
<b>C. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>D. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
1. Deskripsi Perusahaan .....	10
2. Profil Subjek Penelitian .....	12
3. Proses Terjadinya Gratifikasi.....	12
<b>E. PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
<b>F. KESIMPULAN .....</b>	<b>34</b>

### DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kolerasi Teori Pertukaran Sosial dengan Hasil Penelitian .....	27
Tabel 2.	Sifat dan Frekuensi Bentuk Pemberian Gratifikasi .....	32





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Kasus Gratifikasi Tahun 2014-2018.....	2
Gambar 2.	Proses Pengurusan Izin Lingkungan.....	13
Gambar 3.	Implikasi Teoritik .....	34



# **GRATIFIKASI PADA PELAYANAN PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN DI INSTANSI PEMERINTAH**

**KHOIRUN NISAK**

**NIM 201810270211008**

**Program Studi Magister Sosiologi**

**(Dr.Vina Salviana D S, M.Si; Dr. Achmad Habib, M.A)**

## **A B S T R A K**

*Penelitian ini mengkaji tentang proses terjadinya gratifikasi dan bentuk pertukaran sosial yang dilakukan oleh konsultan dan pelayan publik pada pelayanan pengelolaan izin lingkungan di Instansi Pemerintah. Tujuan penelitian mendeskripsikan proses terjadinya gratifikasi pada pelayanan pengelolaan izin lingkungan dan untuk mengetahui secara mendalam bentuk pertukaran sosial yang dilakukan oleh konsultan dan pelayan publik di Instansi Pemerintah. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial dari tokoh Peter Michael Blau, jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian kualitatif, penentuan subjek menggunakan teknik Snowball. Hasil penelitian ini menemukan bahwa gratifikasi yang terjadi pada pengelolaan izin lingkungan di instansi pemerintah memiliki ketertarikan satu sama lain karena konsultan dan pemerintah saling membutuhkan untuk mendapatkan kepuasan timbal balik dengan cara memberikan ganjaran sesuai yang diinginkannya, fenomena gratifikasi berkembang menjadi hubungan persaingan antara stakeholder sehingga terjadi kesenjangan antar stakeholder karena instansi pemerintah melihat dari segi besar tidaknya ganjaran, terjadinya gratifikasi yang sangat sengit dan terdapat persaingan dari penjurur arah atau dari stakeholder lainnya maka, instansi pemerintah akan leluasa untuk melakukan tindakan yang lebih kejam lagi untuk menekan yang membutuhkan. Dengan adanya hal tersebut maka terjadilah ketidakfungsian pelayanan publik sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 dan menggunakan kekuasaan jabatannya untuk melakukan pemaksaan kehendak kepada konsultan dengan maksud mendapatkan uang dan kepuasan untuk kepentingan pribadi, proses relasi yang terjadi pada kasus gratifikasi pada pengelolaan izin lingkungan di instansi pemerintah yaitu mikrostruktur dan makrostruktur. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada yang sejalan dengan teori Blau dan ada beberapa proposisi tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial (social exchange) khususnya kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL. Beberapa tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial dari Blau karena terdapat instansi pemerintah yang tidak mau menerima gratifikasi dengan alasan sebagai pegawai negeri seharusnya memberikan pelayanan prima dan Provinsi KL merupakan provinsi yang baru dibentuk dan pemekaran dari Provinsi KT, sehingga sistem pemerintahannya juga tergolong baru terbentuk. Apabila instansi tersebut berulah atau melakukan pelanggaran maka dengan mudah diketahui oleh Instansi Pusat. Provinsi KL sebagian besar sukunya adalah dayak dan provinsi tersebut juga berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya di serawak dan sabah yang mayoritas juga memiliki suku yang sama yaitu dayak. Dapat diketahui bahwa di Provinsi KL masih belum banyak turis atau wisatawan yang mendatangi daerah tersebut sehingga mayoritas suku dayak masih kental dan belum tercemar dengan suku yang lainnya sehingga masih memegang teguh suku tersebut sehingga apabila melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan dirinya dan masyarakat lain hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di Provinsi KL.*

**Kata kunci:** gratifikasi, izin lingkungan, pelayanan publik dan konsultan

## **ABSTRACT**

*This study examines the process of gratification and forms of social exchange conducted by consultants and public servants in the service of managing environmental permits at Government Agencies. The purpose of the study is to describe the process of gratification in the service of managing environmental permits and to find out in depth the forms of social exchanges carried out by consultants and public servants at Government Agencies. The analysis in this study uses the theory of social exchange from Peter Michael Blau, with type of research is descriptive research types, and the method is qualitative research approaches, and also to determine the subject using the Snowball technique. The results of this study found that gratification that occur in the management of environmental permits in government agencies have an interest in each other because consultants and the government need each other to get mutual satisfaction by providing rewards as desired. the phenomenon of gratification develops into a competitive relationship and gaps arise between stakeholders because government agencies see in terms of whether or not the rewards are enough for them. With the occurrence of gratification which is very fierce and there is competition from all directions or from other stakeholders, government agencies will be free to take even more cruel actions to suppress those in need. Because of this, there was a malfunction of public services as stated in the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (MenPAN-RB) number: 63 / KEP / M.PAN / 7/2003 and used the authority of his office to force the will of consultants with the purpose of getting money and satisfaction for personal interests, the relationship process that occurs in the case of gratification in the management of environmental permits in government agencies, namely microstructure and macrostructure. Based on the results of the study it can be seen that there are congruence with Blau theory and there are some propositions that it is not in accordance with the theory of social exchange, especially cases that are in KL Government Agencies. the reason why it is not in accordance with the theory is because the government agencies that do not want to accept gratuities on the grounds that as civil servants should provide excellent service and KL Province is a newly formed province and the division of KT Province, so the government system is also relatively newly formed. If the agency is acting up or committing an offense, it is easily known by the Central Agency. Most of the KL Province is Dayak and the province is also directly bordered by Malaysia precisely in Sarawak and Sabah, the majority of which also have the same ethnic group, Dayak. It can be seen that in KL Province there are still not many tourists who come to the area, with the majority of Dayak people who have not been mixed with other tribes and are still very firm in their rules, so that when committing a violation that could endanger themselves and other people, this is not done by community in KL Province.*

**Keywords:** gratification, environmental permit, public service and consultant

## **A. PENDAHULUAN**

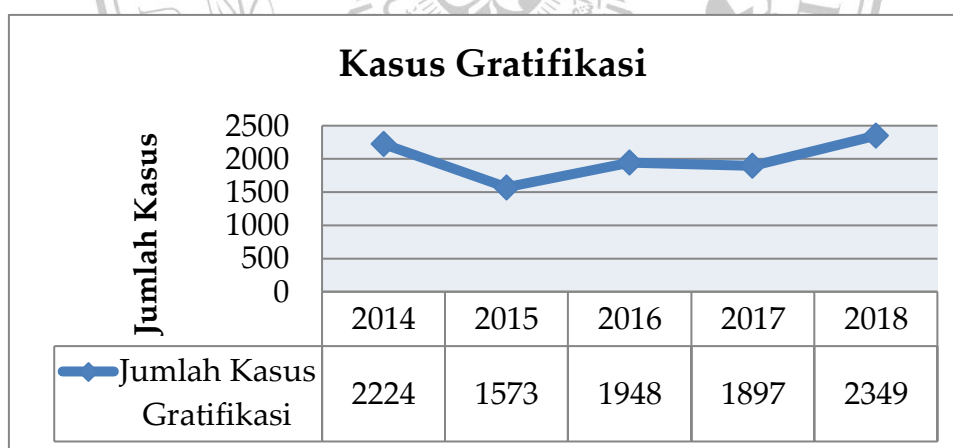
Kebutuhan akan infrastruktur terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah membuat Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016, Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Atas dasar peraturan tersebut maka semua perusahaan baik Negara maupun swasta serta pemerintah berlomba – lomba untuk melakukan percepatan terhadap seluruh pembangunan khususnya proyek strategis nasional (Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016).

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat tidak lagi hanya berorientasi untuk peningkatan dari segi ekonomi saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana. Pembangunan yang berwawasan lingkungan bertujuan agar kesejahteraan masyarakat yang ada pada saat ini dapat terpenuhi dengan mengingat kebutuhan masyarakat dimasa mendatang yang semakin meningkat tanpa harus mengganggu kelangsungan lingkungan hidup.

Sesuai Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa suatu pembangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi perubahan lingkungan dan ekosistem disekitar lokasi kegiatan, maka diperlukan izin lingkungan sebelum kegiatan dilakukan. Izin lingkungan diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait yaitu Instansi Lingkungan Hidup/Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau instansi terkait yang bertanggungjawab sesuai dengan wilayah administrasinya. Dalam pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah banyak terjadi penyimpangan sosial salah satunya yaitu kasus gratifikasi.

Fenomena gratifikasi telah marak terjadi/mengakar dan membudaya serta tidak memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga menjadi fenomena sosial

yang besar di Indonesia. Gratifikasi bukanlah permasalahan yang kecil dan baru, tetapi dari awal kehidupan manusia dalam bermasyarakat telah bergejolak dengan gratifikasi. Fenomena sosial ini merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat serta Negara. Hal ini diperkuat dengan data dari Laporan Tahunan KPK (2015-2019) banyak kepala pemerintahan yang tertangkap seperti Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, M. Basuki karena tidak melaporkan gratifikasi; Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, karena kasus suap yang diberikan oleh Direktur PT Telaga Biru Semesta. Kasus serupa yaitu suap dengan tertangkapnya Bupati Bekasi nonaktif, Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, dengan tuduhan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin kepada PT Mahkota Sentosa Utama. Selain itu pada laporan tahunan KPK juga menyatakan bahwa jumlah laporan gratifikasi setiap tahunnya meningkat. Secara rinci jumlah kasus gratifikasi tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



*Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015- 2019*

**Gambar 1. Jumlah Kasus Gratifikasi Tahun 2014 – 2018**

Gratifikasi dapat memberikan dampak negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menyatakan bahwa: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial maka praktek tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi. Apabila pembedaan ini sudah diperbuat, maka kejadian korupsi akan marak terjadi di kalangan masyarakat. Akan tetapi, makna kebiasaan pemberian sebagai suatu sumber kesewenangwenangan dalam jaringan kausal korupsi, mengingat fakta bahwa praktek-praktek lain yang disetujui oleh masyarakat telah dijangkiti oleh korupsi atau gratifikasi” (Alatas, 1983: 56). Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian dan penerimaan hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam hubungan kemasyarakatan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau sebaliknya, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya gratifikasi yaitu faktor internal seperti sifat rakus/tamak yang dimiliki oleh seseorang, gaya hidup yang konsumtif dan moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor eksternal seperti politik, ekonomi, organisasi, kultur dan budaya, pimpinan dan sistem. Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Blau terjadinya pertukaran sosial atau gratifikasi karena terdapat ketertarikan melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbal balik. Asumsinya adalah orang yang memberikan ganjaran, melakukan hal itu sebagai pembayaran bagi nilai yang diterimanya. Dari ketertarikan muncul persaingan dimana setiap orang menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan maksud menekan orang lain dan sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik. Persaingan melahirkan munculnya sistem stratifikasi dimana individu-individu dibedakan atas dasar kelangkaan sumber-sumber yang dimilikinya yang melahirkan konsep “emergent” tentang kekuasaan. Kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa.

Faktanya berdasarkan pengalaman dari tahun 2011 – 2018 kasus gratifikasi sering terjadi pada pelayanan publik khususnya pada proses pengurusan izin lingkungan. Kasus tersebut sering terjadi antara Konsultan dan Instansi Pemerintah. Mereka melakukan gratifikasi dengan maksud saling memberikan imbal balik dan melakukan kebiasaan memberikan penghargaan kepada pelayanan publik dengan harapan dipermudah untuk mendapatkan izin lingkungan atau sebaliknya pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang ekstra atau dapat menerbitkan izin lingkungan apabila diberikan imbalan yang saling menguntungkan, serta terjadinya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh oknum pelayanan publik dengan maksud mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan otoritas dari jabatannya. Tindakan kejahatan yang saling menutupi dengan mengharapkan imbal balik yang saling menguntungkan atau terjadinya pertukaran sosial/gratifikasi yang semakin teratur atau saling menutupi satu sama lain sehingga membentuk suatu struktur yang kuat hal inilah yang menjadi pemicu meledaknya dan mengakar budaya kasus gratifikasi yang semakin merajalela dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gratifikasi merupakan kejahatan yang selalu mengalami dinamika modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan kejahatan gaib yang sangat sulit memperoleh pembuktiannya.

Pelayanan publik seharusnya dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001) dan seharusnya pelayanan publik pure no price atau tidak ada pungutan / membayar lebih dalam pelaksanaannya. Namun sesuai pada kenyataannya praktik gratifikasi masih saja dapat di temukan di Instansi Pemerintah khususnya pada proses pengurusan izin lingkungan. Atas dasar fenomena diatas maka perlu dilakukan untuk mengungkap lebih dalam mengenai terjadinya gratifikasi pada pelayanan pengurusan izin lingkungan di Instansi Pemerintah.



## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditindaklanjuti, penelitian ini juga dapat membantu penelitian baru untuk menjadi petunjuk dan menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang lebih akurat. Beberapa peneliti yang membahas tentang gratifikasi dan korupsi dapat dilihat pada uraian berikut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa tema yang diambil oleh peneliti hampir sama yaitu tentang gratifikasi, korupsi dan suap tetapi pembahasannya memiliki fokus permasalahan yang berbeda – beda. Penelitian tersebut fokus kajiannya adalah pada persepsi masyarakat yang keliru dan tidak mengerti makna gratifikasi, terjadi pertukaran sosial berupa suap dan korupsi terbentuk karena terlibat pada arena sosial (Guanxi) Cina hal ini terjadi sebagai budaya orang Cina dan di Cina tidak melanggar aturan dan dianggap sebagai kewajiban. Lain halnya dengan kasus yang berbeda yaitu terjadi korupsi dimulai dengan konsepsi upeti sebagai instrumen kelangsungan hubungan hirarkis antara penguasa penakluk dengan masyarakat yang ditaklukan, sebagai rasa atau wujud pengabdian dan menyerah baik secara material maupun jiwa sehingga terbangun pemaknaan yang salah dari upeti menjadi wujud pasrah yang kemudian termodifikasi sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dari birokrasi patrimonial menjadi struktur sosial yang dilengkapi dengan unsur birokrasi “modern”. Pembahasan jurnal lainnya berkaitan dengan korupsi yang dibahas dari sudut pandang kekuasaan, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam tingkat Negara.

Dari penelitian yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa belum ada yang membahas tentang gratifikasi pada pengurusan izin lingkungan dengan menggunakan perspektif teori Peter Maicle Blau tentang Pertukaran Sosial. Oleh karena itu, mengingat urgennya masalah ini baik bagi masyarakat maupun instansi pemerintah di Indonesia serta pentingnya pengembangan keilmuan maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Pada penelitian terdahulu seperti yang diuraikan diatas, masih dipandang perlu untuk dikembangkan dan diteliti secara mendalam sehingga dapat mengetahui secara untuh tentang gratifikasi yang terjadi pada Instansi Pemerintah dalam pengurusan izin lingkungan yang marak terjadi di pemerintahan Indonesia serta dapat memberikan pengembangan keilmuan dan pengetahuan yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian sejenis dimasa mendatang. Penelitian ini berjudul “Gratifikasi Pada Pelayanan Pengurusan Izin Lingkungan di Instansi Pemerintah”. Fokus permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini lebih ditekankan pada bagaimana proses terjadinya gratifikasi bentuk pertukaran yang dilakukan oleh konsultan dan pelayanan publik pada pengurusan izin lingkungan. Pendekatan penelitian ini menggunakankualitatis dan jenis penelitian deskriptif.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **a. Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian yang dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.

Gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama. Dalam Negara sendiri, undang-undang sudah menegaskan pada nomor 31 tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 dimana gratifikasi merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, berupa fasilitas,tiket, dan hotel maupun aspek yag terkait dengan pemberian hak termasuk hak kekayaan intelektual (HAKI).

## **b. Pelayanan Publik**

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3).

Menurut Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Sinambela Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik. Pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada

organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepadapenerima pelayanan.

**c. Izin Lingkungan**

Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (PP No 27 Tahun 2012).

**d. Peraturan**

Peraturan terkait gratifikasi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fenomena gratifikasi tercantum pada Pasal 12 B yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - (b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C menyatakan bahwa :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

### **3. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial dari tokoh Peter Michael Blau. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peter Michael Blau mengemukakan empat mengenai kelompok-kelompok sosial yang bersifat “emergent” ini dapat diamati ide-ide sebagai berikut (Poloma, 2000: 93) :

- (1) Dalam hubungan pertukaran yang elementer, orang tertarik satu sama lain melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbal balik. Asumsinya adalah orang yang memberikan ganjaran, melakukan hal itu sebagai pembayaran bagi nilai yang diterimanya.
- (2) Pertukaran mudah berkembang menjadi hubungan-hubungan persaingan dimana setiap orang harus menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan maksud menekan orang lain dan sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik.
- (3) Persaingan melahirkan munculnya sistem stratifikasi dimana individu-individu dibedakan atas dasar kelangkaan sumber-sumber yang dimilikinya yang melahirkan konsep “emergent” tentang kekuasaan.

- (4) Kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa. Wewenang tumbuh berdasarkan nilai-nilai yang sah yang memungkinkan berbagai kelompok dan organisasi yang bersifat “emergent” tanpa mendasarkan diri atas hubungan intim yaitu hubungan tatap muka. Para anggota menyadari bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan kelompok maupun pertukaran di tingkat individu. Di pihak lain, penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa mengundang banyak masalah sehingga dapat meningkatkan perkembangan nilai-nilai oposisi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial dari tokoh Peter Michael Blau, jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian kualitatif, penentuan subjek menggunakan teknik Snowball. Subjek penelitian ini adalah konsultan di PT ABC sebanyak 7 orang, PT BB 1 orang dan instansi pemerintah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan metode keabsahan data menggunakan triangulasi subjek.

### **D. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Deskripsi Perusahaan**

Lokasi penelitian ini berada di PT. ABC, PT. BB dan Instansi Lingkungan Hidup khususnya dibagian tata lingkungan. PT. ABC bekerjasama dengan *stakeholder* di seluruh Indonesia untuk membantu dalam pengurusan izin lingkungan. Sedangkan PT BB merupakan perusahaan swasta yang tergolong besar dan memiliki bidang usaha yang banyak tetapi untuk pengurusan izin lingkungan dilakukan oleh karyawan sendiri yang telah memiliki sertifikat dari Instansi Pusat. Kewenangan dalam pengurusan izin lingkungan sesuai yang termaktup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P38 Tahun 2019 yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga secara langsung kedua perusahaan tersebut juga harus selalu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup yang berada di seluruh Indonesia untuk melakukan pengurusan izin lingkungan. Dalam hal ini

peneliti membatasi lokasi penelitiannya yaitu berada di Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung dan Aceh.

PT. ABC merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang lembaga jasa konsultansi lingkungan yang telah berdiri sejak tahun 2007. Konsultan Lingkungan adalah sebuah perusahaan milik swasta / pribadi yang memberikan jasa kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan membangun usaha dan/atau kegiatannya seperti Pabrik, Industri, Pergudangan, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan, Proyek Kelistrikan, Pelabuhan, Bandara dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan yang berlaku harus melengkapi rencana usahanya dengan Izin Lingkungan sebelum melakukan konstruksi / pembangunan usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan tersebut diterbitkan oleh Instansi Pemerintah baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Kantor pusat PT. ABC berada di Kota A Provinsi Jawa Timur, sedangkan kantor cabangnya berada di Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat. Selain itu perusahaan ini juga memiliki perwakilan tim yang berada di seluruh Indonesia. Lingkup kerja yang dilakukan oleh perusahaan ini memiliki banyak bidang gerak yang dikerjakan, salah satunya yaitu membantu klien untuk menyusun dokumen lingkungan dan melakukan pengurusan izin lingkungan. PT. ABC telah bekerjasama beberapa *stakeholder* meliputi BUMN, Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Universitas yang berada di seluruh Indonesia.

Lokasi penelitian yang kedua yaitu di Instansi Pemerintah khususnya di bagian tata lingkungan yang berada di Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung dan Aceh. Tugas dari Instansi Pemerintah ini yaitu melayani konsultan dalam proses pengurusan izin lingkungan. Tugas secara rinci yang dilakukan oleh instansi tersebut meliputi menerima pendaftaran dokumen lingkungan, mengoreksi atau uji administrasi berkas dan dokumen lingkungan yang didaftarkan oleh konsultan, memvalidasi dokumen lingkungan yang didaftarkan, menyiapkan tempat sidang/pembahasan, melakukan pembahasan



dokumen lingkungan, mengoreksi dan asistensi dokumen lingkungan, menerbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan/rekomendasi serta menerbitkan izin lingkungan.

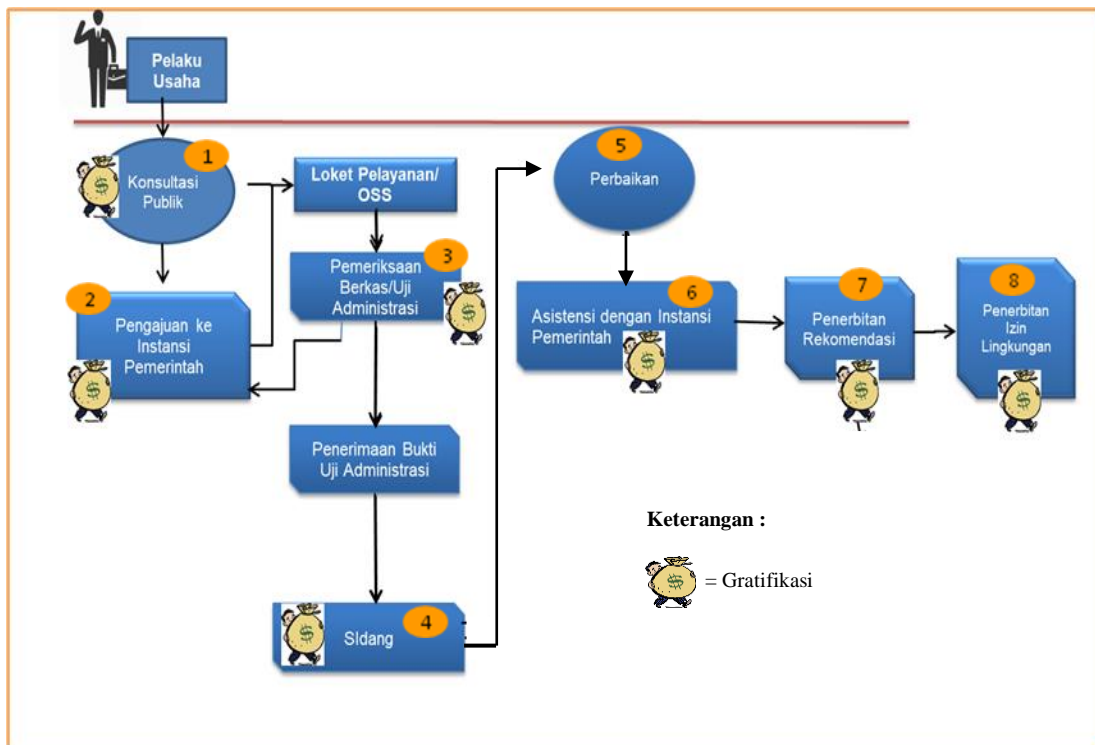
## **2. Profil Subjek Penelitian**

Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu konsultan PT. ABC khususnya yang mengurus izin lingkungan yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang dari instansi pemerintah bagian tata lingkungan.

Data – data yang diperoleh dari subjek melalui observasi dengan mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek khususnya berkaitan dengan penelitian ini selama bersama subjek penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan secara tidak terstruktur pada saat berdiskusi santai baik di kantor, di lokasi sidang, saat survey lapangan, maupun saat bersantai waktu makan, seminar dan di lokasi lain seperti hotel. Dokumentasi berupa catatan harian subjek, *chatting* via media sosial dan video. Untuk memvalidasi data, peneliti juga mewawancarai 1 (satu) subjek dari PT. BB.

## **3. Proses Terjadinya Gratifikasi**

Proses pengurusan izin lingkungan melalui beberapa tahapan, secara rinci dapat dilihat pada bagan alir berikut.



**Gambar 2. Proses Pengurusan Izin Lingkungan**

Setiap tahapan dalam pengurusan izin lingkungan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atau terjadinya penyimpangan sosial terutama kasus gratifikasi. Pada analisis ini memfokuskan masalah gratifikasi pada pelayanan pengurusan izin lingkungan di Instansi Pemerintah yang ditinjau dari teori pertukaran sosial Peter Michael Blau, secara rinci hasil penelitian dapat dilihat pada uraian berikut.

Step yang *pertama* pemberitahuan rencana kegiatan, pada step ini konsultan melakukan pemberitahuan rencana kegiatan yang akan dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah. Dari sini awal mulai konsultan dan Instansi Pemerintah berkomunikasi untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui struktur organisasi khususnya yang terlibat dalam pengurusan izin lingkungan dan mekanisme proses secara rinci yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin lingkungan. Setelah melalui pembicaraan tersebut maka dari situlah awal memulai terjadinya gratifikasi untuk melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan harapan konsultan menginginkan kemudahan untuk mendapatkan izin lingkungan dengan waktu

yang tidak lama dan tidak membebankan konsultan tetapi Instansi Pemerintah memberikan statement apabila minta proses cepat maka harus saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek diperoleh hasil sebagai berikut : Dari ke tujuh subjek hanya 1 orang yang menemukan indikasi terjadinya gratifikasi yaitu pada subjek Giver A. Giver A dengan instansi terkait di awal setelah mendapatkan proyek selalu mengawali koordinasi terkait bagaimana pelaksanaan dan proses pengurusan izin lingkungan. Berawal dari pembicaraan tersebut maka terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Hal ini dapat divisualisasikan melalui percakapan sebagai berikut :

**Giver A**

- Instansi : dalam 1 minggu sudah terbit tergantung kepala dinas jika ada ditempat ya cepat bu....”
- Giver A : mohon info pak/bu kira – kira untuk biaya sidang Kerangka Acuan dan ANDAL & RKL – RPL berapa ya pak/bu..?
- Instansi : tergantung yang diundang....
- Giver A : standarnya biasanya berapa ya pak/bu.....sambil tersenyum...
- Instansi : KA 40 – 50 dan yang ANDAL ya sekitar 70 – 100
- Giver A : sambil tersenyum.....mohon maaf pak/bu harus segitu ya pak/bu.....itu sudah sampai izin terbit atau hanya sidang saja ya pak/bu ?
- Instansi : hanya sidang aja
- Giver A : bisa kurang tidak ya pak/bu....hehe
- Instansi : KA 40 – 45 dan ANDAL 70 – 90 an
- Giver A : itu sudah sama izinnya belum ya pak/bu...
- Instansi : belum, beda bu
- Giver A : dalam hati waduh besar bener yo.....pak/bu mohon bantuanya...kalau untuk SKKL dan izin lingkungan kira kira berapa ya....
- Instansi : nanti saja bu kalau dokumen sudah *clear* baru dibicarakan...

Giver A tetap melanjutkan pertanyaannya karena sudah terlanjur disitu dan jauh – jauh menemui instansi masak koordinasinya separo, sebut dalam hatinya.

- Giver A : pak/bu tolong mumpung saya disini sudah jauh – jauh kesini menemui bpk/ibu mohon infonya...
- Instansi : untuk izin karena harus diberikan sama dinas lainnya dan

mohon untuk yang membantu memproses juga diperhatikan ya bu....sambil tersenyum....

Giver A : baik pak/bu....kira – kira pak/bu gimana...

Intansi : sekitar kurang lebih 100 an

Giver A : segitu ya pak/bu.....mohon dibantu pak/bu bisa kurang tidak ya pak/bu anggaran kami tidak ada segitu....sambil tersenyum....hehe

Instansi : tidak jauh dari itu bu karena harus di sampaikan ke insatnsi lainnya juga”

Step **kedua** konsultasi publik, untuk melakukan konsultasi publik melibatkan banyak jajaran antara lain masyarakat, pemerhati lingkungan, LSM, tokoh agama, tokoh adat, TNI, kepolisian, pemerintah dari jajaran Kades/Lurah sampai jajaran tinggi/Instansi terkait, perwakilan masyarakat konsultan dan pengusaha selaku pemilik usaha. Agar kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan lancar atau tujuan untuk memberikan sosialisasi/konsultasi publik kepada masyarakat dan pemerintah tersampaikan maka konsultan meminta pemerintah dari jajaran Kades/Lurah/Camat/Instansi Pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelum kegiatan tersebut dimulai maka konsultan melakukan koordinasi dengan jajaran tersebut untuk menyiapkan segala fasilitas dan konsumsinya dll. Disinilah terjadinya gratifikasi dan pemerasan terjadi, Kades/Lurah/Camat/Instansi Pemerintah melakukan aksi tawar menawar dengan konsultan. Apabila konsultan tidak menuruti yang diinginkan oleh jajaran tersebut maka kegiatan konsultasi publik tidak boleh berjalan/tidak boleh dilaksanakan. Dengan adanya tekanan tersebut dan karena mengingat target yang diberikan oleh pengusaha kepada konsultan untuk dapat melakukan kegiatan tersebut lebih cepat, maka konsultan tidak memiliki jalan lain dengan cara menuruti kemauan dari keinginan jajaran tersebut sehingga kegiatan konsultasi publik bisa berjalan/terlaksana sesuai yang diinginkan oleh konsultan dan pengusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek diperoleh hasil sebagai berikut : Dari ke delapan subjek sebagian besar subjek mengalami hal yang serupa terdapat kesulitan untuk koordinasi dengan instansi karena di permasalahkan dengan biaya dan pinjam tempat ini terjadi pada subjek Giver

B, C, D, E, dan H. Dari ke 8 subjek tersebut memiliki pengalaman yang beda dan adapula yang sama. Giver B, C, D, E dan H pada waktu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelum melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus koordinasi dengan kades, camat dan instansi setempat. Pada saat koordinasi tersebut terjadi perbincangan mengenai keinginan untuk mendapatkan uang lebih dari konsultan lingkungan, apabila tidak dipenuhi maka kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan.

**Ketiga**, pengambilan sampling dilakukan untuk memperoleh data rona lingkungan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling dari laboratorium yang ditunjuk oleh konsultan. Setelah data diambil di lapangan oleh petugas sampling, maka dilakukan analisa laboratorium oleh laborat tersebut. Agar hasil analisa laboratorium dapat diterbitkan lebih cepat maka konsultan harus memberikan biayanya lebih kepada laboratorium. Biaya tersebut resmi dibebankan kepada konsultan karena meminta percepatan. Pada tahap ini terjadi gratifikasi antara laboratorium dengan konsultan. Dimana dari ke 8 subjek hanya 1 subjek yang pernah menerima gratifikasi dari laboratorium yaitu Giver C. Giver C mendapatkan parcel dari laboratorium, yang mana parcel tersebut digunakan laboratorium untuk bermaksud selalu dikasih kerjaan lebih banyak dari Giver C. Hal tersebut terjadi karena pihak laboratorium sudah mengetahui bahwa Giver C merupakan karyawan yang diberikan kewenangan untuk menentukan kerjasama dalam pengurusan analisa dan sampling dengan pihak ke 3. Sehingga dengan memberikan sebuah parcel kepada Giver C, laboratorium dengan mudah mendapatkan proyek atau pekerjaan yang lebih banyak. Parcel tersebut diberikan langsung kepada Giver C secara pribadi dan tidak dikirim ke kantor Giver C tetapi kerumah Giver C.

**Keempat**, permohonan izin lingkungan ini dilakukan di Instansi Pemerintah dengan melampirkan berkas – berkas yang telah ditetapkan sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada proses permohonan ini maka konsultan dan Instansi Pemerintah berkomunikasi kembali secara intens untuk melanjutkan kesepakatan yang telah dibuat pada awal pertama pengenalan di step yang

pertama. Pada step ini mulai terlihat yang sebenarnya karakter dari masing – masing anggota yang berada di Instansi Pemerintah tersebut untuk menginginkan imbalan yang diharapkan.

**Kelima**, kegiatan uji administrasi adalah proses pengecekan terhadap berkas – berkas yang telah dimasukan atau dimohonkan oleh pemrakarsa/pengusaha melalui konsultan kepada Instansi Pemerintah. Pada proses ini sering saja terdapat hambatan dan banyak alasan yang dilontarkan oleh Instansi Pemerintah antara lain kurangnya berkas yang dimohonkan padahal sesuai dengan list dari peraturan berkas sudah tidak ada kekurangan tetapi permintaan untuk dilengkapi kekurangan berkas itu harus dilampirkan sehingga proses mengulang kembali sampai dinyatakan berkas lengkap, alasan lain terlalu banyak kegiatan sehingga tidak dapat melakukan uji administrasi, dinas luar, dan alasan lain yang seharusnya konsultan tidak perlu tau juga disampaikan misalnya selalu lembur untuk mengurus kegiatan yang lain sehingga pulang larut malam dan dimarahi keluarga tercinta. Dengan adanya hal tersebut maka konsultan harus melakukan pendekatan lagi lebih intens dengan cara mendekati secara personal dengan mencari tau sebab alasan tersebut benar atau hanya ucapan saja. Pada kenyataannya memang ada beberapa yang benar seperti dinas luar tetapi alasan yang lainnya merupakan kode dari instansi tersebut untuk meminta imbalan yang sepantasnya didapatkan. Setelah diberikan imbalan tersebut dalam waktu 1 hari uji administrasi selesai dan dapat dilanjutkan step berikutnya yaitu pembahasan/sidang. Pada proses ini yang bermain adalah jajaran staff - staff di Instansi Pemerintah tersebut.

Step **keenam**, pembahasan/sidang dilakukan di Instansi Pemerintah dengan mengundang jajaran – jajaran yang pernah diundang dalam kegiatan konsultasi publik pada step kedua. Sebelum kegiatan pembahasan ini dilakukan maka, konsultan harus berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah untuk meminta plot jadwal pembahasan/sidang. Disinilah terjadinya kesepakatan atau terjadinya gratifikasi antara konsultan dan pemerintah untuk permintaan jadwal sidang lebih awal atau didahulukan. Dalam proses ini jajaran dari staff sampai dengan kepala instansi terlibat untuk mendapatkan

bagiannya dan meminta diselipkan bagiannya didalam biaya pembahasan/sidang. Apabila pertukaran imbal balik tersebut saling sepakat maka jadwal sidang akan didahulukan dan jika sebaliknya maka akan diabaikan dan mendapatkan jadwal sidang sesuai dengan antrian atau setelah pembahasan dari beberapa stakeholder lainnya. Selain itu juga terdapat paksaan untuk memberikan honor lebih dan memaksa untuk disediakan hotel yang sesuai dengan yang diinginkan dll dari jajaran instansi yang diundang dalam kegiatan sidang. Kejadian ini dialami oleh Giver B, Giver C dan Giver D. Adapun percakapan subjek dengan instansi sebagai berikut :

**Giver B**

Giver B sebelum kegiatan sidang/pembahasan dokumen lingkungan harus berkoordinasi dengan peserta undangan, dengan tujuan memastikan kehadiran untuk mewakili acara sidang. Pada saat berkoordinasi salah satu dengan instansi yaitu camat di Kota E, Provinsi E. Camat tersebut dari awal baik tetapi setelah memnanyakan terkait nilai honor dan fasilitas yang disediakan oleh pelaksana rapat, camat tersebut memarahi Giver B. Standart fasilitas dan honor sudah ditentukan instansi pusat.

- Giver B : untuk peserta undangan rapat biaya penginapan kami ganti per orang Rp 11 dan honor Rp1111 serta ganti transport Rp 111
- Camat : semua camat sama segitu.....apa camat tidak dikasih lebih?
- Giver B : mohon maaf, anggarannya memang segitu pak
- Camat : saya pastikan jika honor khusus camat - camat tidak diberikan 2 kali lipat dari standart dan saya minta di siapkan penginapan di hotel Zuri untuk camat - camat dan 8 kades masing - masing 1 kamar sendiri tidak bakalan hadir.

Hal ini juga di rasakan oleh Giver C dan Giver D juga tetapi ada perbedaan sedikit dari yang dialami oleh Giver B. Giver C mengalami hal yang serupa di dua instansi yang mana sebelum sidang harus koordinasi terlebih dahulu. Yang pertama berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup di Provinsi D. Sebelum sidang Giver C diminta untuk menanyakan terkait biaya sidang di instansi tersebut.

Lain halnya dengan Giver B dan C, yang dialami oleh Giver D sedikit ada perbedaan yaitu Giver D selama dia keliling Indonesia dan mengurus izin



lingkungan baru kali ini menemukan instansi yang benar – benar baik dan tulus untuk membantu mengurus izin lingkungan. Setelah selesai sidang terdapat peserta undangan yang tidak hadir dalam acara sidang tetapi memberikan saran masukan untuk studi lingkungan ini. Waktu itu Giver D mengintruksikan kepada tim yang lain untuk mentransfer uang untuk peserta undangan yang telah memberikan saran masukan sesuai list peserta sidang yang diberikan oleh instansi tersebut. Karena Giver D tidak tau kalau uangnya kelebihan banyak, saat itu juga instansi tersebut menghubungi Giver D memberitahu kalau yang ditransfer ke peserta tersebut uangnya kelebihan banyak.

**Giver D**

Giver D : menjawab tidak apa – apa pak karena sudah terlanjur pak saya tidak enak untuk meminta kembali uang tersebut  
Instansi : bukan seperti itu mas, kalau sisa uang tersebut tidak kami kembalikan nanti kami yang kena KPK mas dan system kerja disini berantakan karena sudah tidak mengikuti SOP dari instansi kami. Terkait komunikasi dengan peserta undangan tersebut kami bantu agar bisa dikembalikan sisa uangnya. Untuk bukti transfERNYA nanti kami kirimkan ke mas nya ya, tolong untuk kedepanya jangan seperti ini ya mas, ikuti saja dengan procedure yang ada pasti akan kami bantu untuk mempercepat pembangunan ini. Karena pembangunan transmisi ini juga untuk kami juga.

***Ketujuh,*** perbaikan berkas dari hasil pembahasan/sidang dilakukan oleh konsultan. Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran masukan dari peserta undangan yang hadir dalam pembahasan tersebut, maka dikembalikan lagi kepada instansi pemerintah untuk dikoreksi. Pada proses perbaikan ini tidak terdapat gratifikasi karena yang melakukan hanya konsultan saja.

***Kedelapan,*** proses asistensi dilakukan antara instansi pemerintah, konsultan dan pengusaha terhadap perbaikan berkas yang telah diperbaiki setelah pembahasan sebelumnya. Untuk melakukan kegiatan ini sebelumnya konsultan juga harus koordinasi terlebih dahulu dengan instansi pemerintah untuk meminta penjadwalan asistensi, apabila gratifikasi yang sebelumnya lancar maka penjadwalan asistensi juga akan lancar dan apabila sebaliknya maka untuk mendapatkan jadwal asistensi akan dipersulit dan hasil koreksian

dokumen diperlambat. Hal ini di alami oleh Giver B, C dan E. Berikut percakapan yang pernah dilakukan oleh subjek. Ke dua subjek melakukan gratifikasi karena perintah dari perusahaan sehingga tidak bisa menolak. Karena mereka kerja di perusahaan jadi harus menuruti apa yang ditugaskan walaupun sesuai dengan hati naluri mereka sebenarnya menolak.

**Giver E**

Pada saat setelah selesai asistensi Giver E menyerahkan hasil perbaikan dokumen setelah asistensi kepada staff di bagian tata lingkungan dan menanyakan untuk proses selanjutnya. Dari berbincangan tersebut maka terjadilah timbul pertanyaan dari staff instansi kepada konsultan. Ilustrasi percakapan sebagai berikut.

Instansi : biaya asistensi sudah diberikan kepada kabid ya mbk...  
Giver E : sudah pak.....kalau boleh tau kenapa ya pak.....  
Instansi : kabid sudah mau memproses untuk ketahap selanjutnya ya mbk....  
Giver E : ya pak.....dan dokumen kami sudah di acc pak....  
Instansi : Alhamdulillah kalau sudah boleh dilanjutkan mbk, oya saya kira kemarin biayanya belum diberikan ke kabid. Sampai dengan saat ini saya dan teman – teman dibagian sekretariat yang memproses dokumen mbk belum dapat mbk. Tolong kita juga diperhatikan ya mbk sampaikan kepada atasan mbk untuk memperhatikan kami juga karena atasan saya berbeda tidak seperti dahulu, atasan saya sekarang hanya memikirkan untuk level atasan saja mbk.  
Giver E : Baik pak....saya sampaikan kepada manajemen ya pak terkait hal tersebut....

***Kesembilan,*** berkas setelah asistensi setelah dinyatakan ok atau telah sesuai maka instansi pemerintah melakukan proses rekomendasi. Untuk mendapatkan rekomendasi harus melalui beberapa pejabat yang berada di instansi tersebut. Apabila konsultan telah menjalin hubungan baik mulai dari kalangan bawah sampai dengan atasan dengan mengikuti permintaan yang mereka inginkan maka rekomendasi akan terbit dalam waktu yang sangat singkat (2 hari - 1 minggu). Dan jika sebaliknya proses penerbitan rekomendasi akan dipersulit dengan alasan macam – macam. Hal ini di alami oleh Giver A, B, C, D, E, F dan G serta Giver H.

Hasil percakapan dan wawancara seperti pada step sepuluh, karena proses pengurusan SKKL dan izin lingkungan bersamaan.

**Kesepuluh**, gratifikasi yang terjadi dalam proses pengurusan izin lingkungan sangatlah komplrit dan setiap step tahapan untuk melakukan kegiatan tersebut terdapat imbal balik yang sifatnya sukareka bahkan pemaksanaan. Hal ini juga terjadi pada step yang terakhir yaitu penerbitan izin lingkungan. Penerbitan izin lingkungan melibatkan lebih dari 1 instansi pemerintah sehingga permintaan yang inginkan oleh pemerintah tersebut sangat luar biasa bahkan tidak masuk akal atau sangat sadis sekali. Dengan adanya pendekatan secara instens akhirnya terjadi tawar menawar antara pemerintah dan konsultan untuk mendapatkan keinginan yang tidak saling memberatkan. Tetapi pada kenyataannya pada step yang terakhir inilah yang paling sulit untuk dipegang janji pemerintah. Sesuai dengan peraturan telah tertera bahwa izin lingkungan dapat diterbitkan bersamaan dengan rekomendasi dan dengan peraturan baru sesuai PP No. 24 Tahun 2018, izin lingkungan diterbitkan melalui OSS (Online System Submission) sehingga dengan mudah pengusaha dapat melakukan kegiatan pembangunannya. Tetapi pada kenyataannya izin lingkungan masih saja diterbitkan juga secara manual dan melalui online oleh instansi pemerintah tersebut. Sehingga dengan adanya SOP yang diberikan oleh pemerintah konsultan mengikuti alur mekanisme yang harus ditempuh dan memberikan keinginan yang diminta oleh instansi tersebut dengan imbalan yang sangat besar dengan alasan melibatkan lebih dari 1 instansi dan akan dibagikan kepada instansi – instansi tersebut dan disetorkan kepada kepala daerah. Hal ini di alami oleh Giver A, B, C, D, E, F dan G serta Giver H.

Dari kedelapan subjek tersebut pernah mengalami hal yang sama yaitu memberikan uang atau barang dll kepada instansi terkait dengan tujuan dipermudah penerbitan rekomendasi/SKKL dan izin lingkungan. Sebelum melakukan transaksi gratifikasi kedelapan subjek tersebut berkoordinasi atau melakukan persiapan agar seluruh proses transaksi berjalan dengan lancar, aman dan tidak menyebabkan kecurigaan rekan kerja oknum peminta gratifikasi maupun pihak luar seperti negosiasi perihal kesepakatan bentuk

gratifikasi yang diminta, lokasi dan waktu pemberian gratifikasi, cara pemberian gratifikasi, kesepakatan SKKL dan Izin Lingkungan selesai dalam waktu sekian lama, komunikasi dengan menggunakan nomor telepon khusus dan menghindari melakukan percakapan gratifikasi melalui sosial media, walaupun dengan terpaksa harus melakukan percakapan melalui sosial media maka subjek tersebut menggunakan kode bahasa. Hal ini dapat dilihat dari ringkasan wawancara dengan subjek sebagai berikut :

**Giver A**

- Giver A : mohon info pak izinya kira – kira kapan terbit ya  
pak....sesuai hasil pertemuan kemarin untuk berkasnya kami  
hanya bisa setengahnya koper *pak*
- Instansi : saya sampaikan kepada atasan dahulu ya bu
- Giver A : baik *pak*.....
- Instansi : bu sesuai info dari atasan tidak bisa jika setengah koper,  
beliau bisa membantu bu jika 2 koper
- Giver A : kalau boleh tau kira – kira berapa lama izinnya bisa terbit ya  
pak jika dengan 2 koper.....
- Instansi : 1 (satu) bulan bu.....
- Giver A : baik *pak*.....
- Instansi : izin sudah terbit bu....bisa diambil segera.....
- Giver A : baik *pak*....bagaimana pak berkasnya bisa kami kirim bye  
email saja ya pak, karena melihat kondisi seperti ini tidak  
bisa bertemu.....
- Instansi : mohon maaf bu....informasi dari atasan tidak bisa lewat  
email berkasnya, bertemu saja ya bu....
- Giver A : apabila diwakilkan bagaimana *pak*
- Instansi : boleh bu.....menggunakan surat kuasa.....untuk tanggal  
dan tempat mengambil SK segera kami infokan kembali ya  
bu.....

Melihat dari uraian tersebut di atas, diperjelas oleh subjek lainnya yaitu TL.TL digunakan peneliti sebagai subjek yang mewakili dari instansi lingkungan hidup pusat. Dia menyadari bahwa apa yang dialami oleh konsultan adalah benar adanya dan banyak sekali teman – teman TL dan rekan kerja di bawah jajaranya selalu memanfaatkan dan memeras konsultan. TL adalah salah satu staf di instansi pusat yang sering memantau dan mengamati seluruh instansi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini yang disampaikan oleh TL dengan berkata “jian orang – orang dinas di seluruh Indonesia sebagian besar memang begitu mbk, sudah berurung kali

saya ingatkan jangan seperti itu lah kalau cari rizki, tidak usah ngoyo cari rizki kalau kita membantu orang lain dengan ikhlas pasti ada saja rizki datangnya. Mencari rizki jangan dengan cara memeras seperti itu sama konsultan, konsultan seharusnya dibantu agar dipermudah proses izin lingkungannya sehingga pembangunan bisa dilaksanakan, toh pembangunan itu juga buat kita sendiri dampak positifnya. Tetapi iya begitu mbak ada sebagian yang manut sama aku, ada yang tetap dilakukan model seperti itu. Padahal sudah ku ingatkan terus kalau setiap kali melakukan tinjauan ke mereka semua, tidak hanya itu saja yang ku ingatkan tetapi masih banyak cara agar mereka sadar tidak melakukan hal itu lagi.”Saya juga pernah menerima makanan, barang (baju, sajadah, songkok, laptop), tiket umroh dan biaya beasiswa S2 dari konsultan.Saya menerima karena semuanya juga menerima makanan dan barang tersebut, sehingga saya pikir wajar saja. Tetapi untuk tiket umroh dan beasiswa saya ambil karena dari konsultan memberikan secara ikhlas sehingga saya merasa tidak enak kalau dimintai tolong untuk membantu dari segi apa saja. Tidak hanya 1 konsultan yang mau memberikan sesuatu untuk saya melainkan juga banyak konsultan dan pengusaha yang berlomba - lomba ingin mengajak saya untuk bergabung dengan nya, karena mereka tau bahwa saya kerja di instansi pusat tersebut staff honorer sehingga banyak menawarkan untuk gabung. Tetapi saya tidak menerima tawaran dari mereka untuk bergabung dengan mereka hanya saja jika mereka meminta bantuan tetap saya bantu.”

## **E. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka pada bab ini dilakukan pembahasan terkait fenomena terjadinya gratifikasi pada pelayanan pengurusan izin lingkungan di Instansi Pemerintah yang kemudian di interaksikan dengan teori pertukaran sosial oleh Piter Michle Blau.

Teori yang diangkat pada penelitian ini adalah teori pertukaran sosial oleh Piter Michle Blau, yang mana dalam teori ini lebih memfokuskan tentang hubungan antara individu dengan individu lainya atau individu dengan kelompok. Dimana hubungan tersebut terjalin karena saling memiliki tujuan dan manfaat

antara satu dengan yang lain atau saling menguntungkan sehingga terjalinlah suatu hubungan yang nyaman. Dari kenyamanan tersebut maka timbulah kepercayaan dan kepuasan baik dalam bentuk materiil atau non materiil. Dimulai dari kepuasan dan kepercayaan tersebut yang selama ini dijalin, karena sifat manusia memiliki sifat tidak lekas puas dengan hasil yang sudah diperoleh maka akan mencari individu yang lainnya sehingga sampai mendapatkan keuntungan dari individu lainnya tersebut. Hal tersebut dapat menjadikan persaingan antar individu pertama dan yang lainnya untuk saling mendapatkan yang terbaik dan kepuasan sendiri. Persaingan dapat memunculkan power, yang mana dapat membuat seseorang lupa akan tugas dan janji yang sudah di ucapkan waktu awal menjabat. Dari power yang tinggi maka kekuasaan akan timbul dan menjadikan gejala yang dapat memaksa atau sebaliknya.

Acuan teoritik pada penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial Piter Michle Blau. Berdasarkan pengalaman dari ke 9 (sembilan) subjek dapat diketahui bahwa pertukaran sosial berupa gratifikasi terjadi pada pelayanan pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah.

Teori tentang pertukaran sosial yaitu gratifikasi terbukti terjadi di instansi pemerintah khususnya pada pengurusan izin lingkungan. Hal ini terjadi karena memiliki ketertarikan satu sama lain antara konsultan dengan instansi pemerintah saling membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan dan kepuasan timbal balik dengan cara memberikan ganjaran sesuai yang diinginkannya. Konsultan mengharapkan proses izin lingkungannya di percepat oleh instansi pemerintah, sedangkan instansi pemerintah juga mengharapkan imbalan atau ganjaran dari konsultan sesuai dengan yang diinginkan sehingga kedua belah pihak memiliki ketertarikan satu sama lain untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Semakin meningkatnya pembangunan yang ada, maka semakin meningkat pula pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah maka pertukaran sosial pun juga mengalami perkembangan dan terdapat persaingan antar konsultan. Hal ini terjadi karena dengan adanya permohonan izin lingkungan yang semakin banyak atau meningkat maka kerjaan di pelayanan pengurusan izin lingkungan semakin padat. Dengan banyaknya permintaan dari pihak konsultan untuk percepatan pengurusan izin lingkungan, maka instansi pemerintah menggunakan cela ini untuk membuat

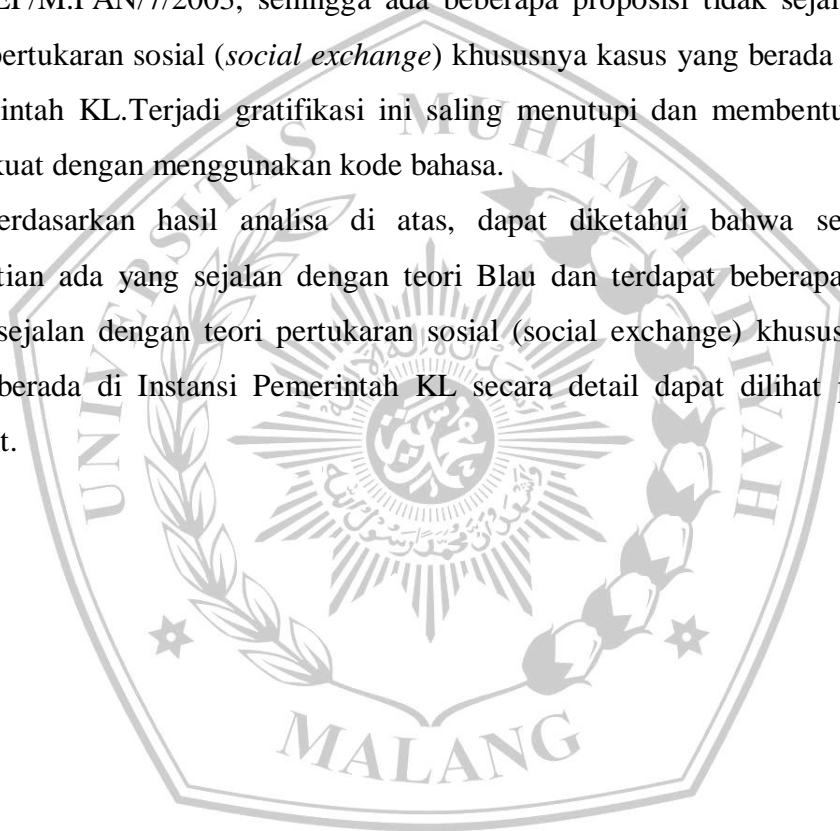
persaingan antara konsultan untuk dapat memberikan ganjaran yang lebih jika proses izin lingkungan ingin di utamakan. Maka terjadilah persaingan antar konsultan untuk saling memberikan ganjaran yang lebih kepada instansi pemerintah agar izinnnya diproses lebih cepat daripada stakeholder yang lain, karena konsultan mendapatkan kontrak kerja dengan pemrakarsa untuk melakukan percepatan pengurusan izin lingkungannya maka dengan cara apapun ditempuh oleh konsultan untuk mendapatkan izin lingkungan secepat mungkin walaupun harus memberikan ganjaran yang sangat besar kepada instansi pemerintah dan menuruti apa yang diinginkan instansi pemerintah tersebut. Dengan adanya persaingan antar konsultan tersebut maka lahirlah kekuasaan yang muncul di instansi pemerintah baik dari tingkat staff maupun pada tingkat atasan. Gratifikasi terjadi karena mereka saling berlomba satu sama lain untuk mendapatkan ganjaran yang semakin banyak lagi dengan tujuan kepuasan pribadi dan kelompok. Sesuai dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadi penyalahgunaan jabatannya untuk melakukan aksinya menekan konsultan untuk dapat menuruti apa saja yang diinginkan dan melakukan tekanan serta ancaman kepada konsultan sehingga mau tidak mau konsultan menuruti apa yang instansi inginkan. Dengan adanya hal tersebut maka terjadilah kekuasaan yang bersifat memaksa. Melihat lingkungan instansi tersebut dan pengaruh dari berbagai penjurur maka semua pegawai yang berada di bagian tata lingkungan ikut tercemar untuk melakukan hal yang sama yaitu untuk saling mencari ganjaran yang diinginkan dengan tujuan individu atau pribadi dan ada beberapa yang bertujuan untuk kelompok. Sesuai hasil penelitian terlihat bahwa pola relasi yang terjadi yaitu mikrostruktur dan makrostruktur. Mikrostruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah terjadinya pertukaran sosial dengan relasi tatap muka langsung tanpa melalui perantara dan terjadi antar individu ke individu yang berkepentingan. Sedangkan makrostruktur adalah terjadinya pertukaran sosial yang tidak tatap muka atau melalui perantara yaitu dengan meminta jajaran staff untuk melakukan proses pertukaran sosial tersebut sehingga dapat memberikan peluang baru untuk staff tersebut melakukan tekanan atau paksaan terhadap konsultan untuk memberikan ganjaran juga seperti yang diinginkan atasannya sehingga membentuk struktur jaringan lingkaran setan terus terjadi dengan tujuan



memberikan imbalan untuk mempermudah proses izin lingkungan. Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa terdapat 7 data terjadinya gratifikasi melalui pola relasi mikrostruktur dan 4 data menggunakan pola relasi makrostruktur, maka dapat diketahui bahwa banyak jajaran tingkat tinggi atau yang memiliki jabatan yang selalu melakukan aksinya untuk melakukan aksi gratifikasi.

Dari hasil temuan diperoleh bahwa tidak semua instansi pemerintah melakukan pemerasan kepada konsultan dan terdapat 1 instansi pemerintah yang melakukan tugasnya sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003, sehingga ada beberapa proposisi tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange*) khususnya kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL. Terjadi gratifikasi ini saling menutupi dan membentuk struktur yang kuat dengan menggunakan kode bahasa.

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat diketahui bahwa sesuai hasil penelitian ada yang sejalan dengan teori Blau dan terdapat beberapa proposisi tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange*) khususnya kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 1. Korelasi Teori Pertukaran Sosial dengan Hasil Penelitian**

NO.	TEORI PERTUKARAN SOSIAL BLAU	HASIL PENELITIAN	KETERANGAN	SEJALAN DENGAN TEORI BLAU	PROPOSISI TIDAK SEJALAN DENGAN TEORI BLAU
1	Hubungan pertukaran yang elementer, orang tertarik satu sama lain melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbal balik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gratifikasi terjadi karena instansi pemerintah dengan konsultan memiliki ketertarikan satu sama lain untuk mendapatkan kepuasan timbal balik dengan cara memberikan ganjaran sesuai yang diinginkannya.</li> <li>- <b>Tidak terjadi hubungan elementer yaitu dengan tidak terdapat ketertarikan satu sama lain untuk mendapatkan kebutuhan berupa ganjaran melainkan hanya terdapat kepuasan untuk memberikan pelayanan terhadap pengurusan izin lingkungan</b></li> <li>- <b>Hubungan pertukaran terjadi dengan saling tertarik satu sama lain untuk memperoleh kepuasan dan kebutuhan timbale balik dengan menutupi satu sama lain sehingga membentuk struktur yang kuat dengan menggunakan kode bahasa.</b></li> </ul>	<p>Ada kesamaan</p> <p>Ada perbedaan</p>	<p>Terjadi hubungan pertukaran yang elementer yaitu dengan saling tertarik satu sama lain untuk mendapatkan kebutuhan dan kepuasan timbal balik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terjadi hubungan pertukaran yang elementer, tidak tertarik satu sama lain untuk mendapatkan kebutuhan berupa ganjaran tetapi mendapatkan kepuasan melakukan pelayanan publik kepada konsultan</li> <li>- Terjadi ketertarikan satu sama lain dengan membentuk struktur yang kuat melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbale balik dengan menggunakan kode bahasa</li> </ul>
2	Pertukaran berkembang menjadi hubungan-hubungan persaingan dimana setiap orang harus menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinyagratisifikasi pada pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah berkembang menjadi hubungan persaingan antara stakeholder yang melakukan pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kesenjangan antara stakeholder yang</li> </ul>	Ada kesamaan	Pertukaran berkembang dan terjadi persaingan antar stakeholder dengan maksud untuk mendapatkan ganjaran lebih baik	Tidak terjadi perkembangan terhadap pertukaran

NO.	TEORI PERTUKARAN SOSIAL BLAU	HASIL PENELITIAN	KETERANGAN	SEJALAN DENGAN TEORI BLAU	PROPOSISI TIDAK SEJALAN DENGAN TEORI BLAU
	maksud menekan orang lain dan sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik	lain karena apabila terdapat perbedaan ganjaran yang diberikan kepada pemerintah maka stakeholder yang kuat akan mendapatkan imbalan yang sesuai diharapkan dan dipercepat proses pengurusan izin lingkungannya dan sebaliknya juga untuk stakeholder yang lemah akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak secepat yang diharapkan. Dari hal tersebut maka stakeholder yang lemah akan tertekan karena terdapat persaingan ganjaran tersebut, mau tidak mau karena ingin mendapatkan pelayanan yang sama maka stakeholder yang lemah tersebut memberikan ganjaran yang sesuai diinginkan pemerintah untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk mempercepat proses pengurusan izin lingkungan tersebut - <b>Tidak terdapat persaingan pada pertukaran yang bersifat menekan dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran yang lebih baik</b>	Ada perbedaan		
3	Persaingan melahirkan munculnya sistem stratifikasi dimana individu-individu	- Persaingan yang sangat sengit dari penjurur arah atau dari stakeholder lainnya maka, instansi pemerintah dengan leluasa dapat melakukan tindakan paksaan dan tekanan	Ada kesamaan	Persaingan menimbulkan terjadinya kekuasaan	Tidak terjadi persaingan yang sehingga tidak melahirkan munculnya sistem stratifikasi yang bersifat

NO.	TEORI PERTUKARAN SOSIAL BLAU	HASIL PENELITIAN	KETERANGAN	SEJALAN DENGAN TEORI BLAU	PROPOSISI TIDAK SEJALAN DENGAN TEORI BLAU
	dibedakan atas dasar kelangkaan sumber-sumber yang dimilikinya yang melahirkan konsep “emergent” tentang kekuasaan	<p>yang lebih kejam lagi kepada yang membutuhkan. Dengan adanya hal tersebut maka terjadilah ketidakfungsian pelayanan publik sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 dan menggunakan kekuasaan jabatannya untuk melakukan pemaksaan kehendak kepada konsultan dengan maksud mendapatkan ganjaran dan kepuasan untuk kepentingan pribadi dan kelompok</p> <p>- <b>Tidak terdapat persaingan yang sehingga tidak melahirkan munculnya sistem stratifikasi yang bersifat kekuasaan</b></p>	Ada perbedaan		kekuasaan
4	Kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa. Wewenang tumbuh berdasarkan nilai-nilai yang sah yang memungkinkan berbagai kelompok dan organisasi yang bersifat “emergent” tanpa mendasarkan diri atas hubungan intim yaitu	<p>- Kekuasaan yang terjadi bersifat sah dan ada pula yang bersifat memaksa.</p> <p>- Bersifat sah terjadi proses relasi mikrostruktur</p> <p>- Bersifat memaksa terjadi proses relasi makrostruktur dan mikrostruktur.</p> <p>- Pertukaran sosial yang bersifat memaksa di tingkat individu dengan proses relasi makrostruktur dapat mempercepat berkembangnya nilai oposisi.</p> <p>- Proses relasi yang terjadi pada kasus gratifikasi pada pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah yaitu mikrostruktur dan</p>	Ada kesamaan	Kekuasaan terjadi bersifat sah dan memaksa serta terjadi relasi bersifat mikrostruktur dan makrostruktur	Tidak terjadi kekuasaan yang bersifat sah atau bersifat memaksa dan tidak terdapat relasi mikrostruktur dan makrostruktur

NO.	TEORI PERTUKARAN SOSIAL BLAU	HASIL PENELITIAN	KETERANGAN	SEJALAN DENGAN TEORI BLAU	PROPOSISI TIDAK SEJALAN DENGAN TEORI BLAU
	<p>hubungan tatap muka. Para anggota menyadari bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan kelompok maupun pertukaran di tingkat individu. Di pihak lain, penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa mengundang banyak masalah sehingga dapat meningkatkan perkembangan nilai-nilai oposisi</p>	<p>makrostruktur. Mikrostruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah terjadinya pertukaran sosial dengan relasi tatap muka langsung tanpa melalui perantara dan terjadi antar individu ke individu yang berkepentingan. Sedangkan makrostruktur adalah terjadinya pertukaran sosial yang tidak tatap muka atau melalui perantara yaitu dengan meminta jajaran staff untuk melakukan proses pertukaran sosial tersebut sehingga dapat memberikan peluang baru untuk staff tersebut melakukan tekanan atau paksaan terhadap konsultan untuk memberikan ganjaran juga seperti yang diinginkan atasannya sehingga membentuk struktur jaringan lingkaran setan terus terjadi dengan tujuan memberikan imbalan untuk mempermudah proses izin lingkungan</p> <p>- <b>Tidak terjadi kekuasaan yang bersifat sah atau bersifat memaksa dan tidak terdapat relasi mikrostruktur dan makrostruktur</b></p>	<p>Ada perbedaan</p>		

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sesuai dengan hasil penelitian jika pertukaran terjadi ketertarikan satu sama lain maka sejalan dengan teori pertukaran sosial dari Blau dan ada beberapa proposisi tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange*) khususnya pada kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL.

Alasan beberapa proposisi tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange*) khususnya pada kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL karena terdapat instansi pemerintah yang tidak mau menerima gratifikasi walaupun pernah dicoba konsultan untuk diberikan uang lebih tetapi dikembalikan dengan alasan tidak mau menerima gratifikasi karena sebagai pegawai negeri seharusnya memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan instansi pemerintah mengikuti prosedur/SOP serta peraturan yang ada sehingga tidak melanggar norma dan jika kami terima gratifikasi tersebut menjadi beban kami karena pada zaman sekarang sangat ketat dan banyak yang memantau baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta KPK, maka untuk kebaikan kinerja instansi pemerintah tidak berani untuk melakukan hal – hal yang melanggar peraturan dan norma terlebih melakukan hal – hal yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Provinsi KL merupakan provinsi yang baru dibentuk dan pemekaran dari Provinsi KT, sehingga sistem pemerintahannya juga tergolong baru terbentuk. Apabila instansi tersebut berulah atau melakukan pelanggaran maka dengan mudah diketahui oleh Instansi Pusat. Provinsi KL sebagian besar sukunya adalah dayak dan provinsi tersebut juga berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya di serawak dan sabah yang mayoritas juga memiliki suku yang sama yaitu dayak. Dapat diketahui bahwa di Provinsi KL masih belum banyak turis atau wisatawan yang mendatangi daerah tersebut sehingga mayoritas suku dayak masih kental dan belum tercemar dengan suku yang lainnya sehingga masih memegang teguh suku tersebut sehingga apabila melakukan pelanggaran yang dapat membayakan dirinya dan masyarakat lain hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di Provinsi KL. Melihat hal tersebut maka tidak terjadi hubungan pertukaran yang elementer, tidak tertarik satu sama lain untuk mendapatkan kebutuhan berupa ganjaran tetapi mendapatkan kepuasan

untuk memberikan pelayanan yang prima. Selain itu peneliti juga menemukan hal baru yaitu berupa terjadi ketertarikan satu sama lain dengan membentuk struktur yang kuat melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbal balik dengan menggunakan kode bahasa.

Bentuk pertukaran sosial yang terjadi pada fenomena gratifikasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu yang pernah diberikan oleh subjek kepada instansi pemerintah berupa uang cash dalam bentuk rupiah dan dolar dan ATM yang berisi uang, peralatan kantor (printer, scanner, fax, laptop, komputer) baju, kain, sajadah, songkok, pulsa, makanan dan tiket, AC, *voucher* belanja, dan beasiswa. Secara rinci bentuk pertukaran sosial yang bersifat sah, paksaan serta pengelompokan frekuensi pemberian gratifikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.**  
**Sifat dan Frekuensi Bentuk Pemberian Gratifikasi**

No.	Bentuk Pertukaran Sosial	Subjek Penelitian	Sifat Pemberian		Frekuensi Bentuk Pemberian Gratifikasi		
			Sah	Paksaan	Sering	Sedang	Jarang
1	Uang cash dalam bentuk rupiah	Giver A	√	√	√	-	-
		Giver B	-	√	-	√	-
		Giver C	-	√	√	-	-
		Giver D	√	√	√	-	-
		Giver E	-	√	-	√	-
		Giver F	√	√	-	√	-
		Giver G	-	√	-	-	√
		Giver H	√	√	√	-	-
2	Uang cash dalam bentuk dolar	Giver A	√	-	-	-	√
3	ATM yang berisi uang	Giver A	-	√	-	-	√
4	Peralatan kantor (printer, scanner, fax, laptop, komputer)	Giver A	-	√	√	-	-
		Giver B	-	√	√	-	-
		Giver C	-	√	√	-	-
		Giver D	-	√	√	-	-
5	Baju	Giver A	√	-	√	-	-
		Giver B	√	-	√	-	-
6	Kain	Giver A	√	-	√	-	-
		Giver B	√	-	√	-	-
7	Sajadah	Giver A	√	-	-	√	-
		Giver B	√	-	-	√	-
8	Songkok	Giver A	√	-	-	-	√
		Giver B	√	-	-	-	√

No.	Bentuk Pertukaran Sosial	Subjek Penelitian	Sifat Pemberian		Frekuensi Bentuk Pemberian Gratifikasi		
			Sah	Paksaan	Sering	Sedang	Jarang
9	Pulsa	Giver A	√	-	√	-	-
		Giver B	√	-	√	-	-
		Giver C	√	-	√	-	-
		Giver D	√	-	√	-	-
		Giver E	√	-	√	-	-
10	Makanan	Giver A	√	-	√	-	-
		Giver B	√	-	√	-	-
		Giver C	√	-	√	-	-
		Giver D	√	-	√	-	-
		Giver E	√	-	√	-	-
11	Tiket	Giver B	-	√	√	-	-
		Giver C	-	√	√	-	-
		Giver D	-	√	√	-	-
12	AC	Giver A	√	-	-	-	√
13	Voucher belanja	Giver A	√	-	-	√	-
14	Beasiswa	Giver A	√	-	-	√	-

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 – 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemberian gratifikasi yang bersifat sah yaitu berupa uang cash dalam bentuk rupiah dan dolar, baju, kain, sajadah, songkok, pulsa, makanan, AC, *voucher* belanja, dan beasiswa. Sedangkan yang bersifat paksaan berupa Peralatan kantor (printer, scanner, fax, laptop, komputer), tiket, uang cash dalam bentuk rupiah serta ATM yang berisi uang.

Gambaran secara ringkas mengenai pembahasan yang telah diulas pada uraian diatas terkait proses terjadinya gratifikasi pada pelayanan pengurusan izin lingkungan dan bentuk pertukaran yang dilakukan oleh konsultan dan pelayan publik pada pengurusan izin lingkungan di Instansi Pemerintah dapat dilihat pada gambar berikut.





**Gambar 3. Implikasi Teoritik**

## **F. KESIMPULAN**

Berangkat dari hasil analisis dan temuan dalam uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Proses terajdinya gratifikasi pada pengurusan izin lingkungan karena :
  - a. Memiliki ketertarikan satu sama lain karena konsultan dan pemerintah saling membutuhkan untuk mendapatkan kepuasan timbal balik dengan cara memberikan ganjaran sesuai yang diingkannya
  - b. Terdapatnya perkembangan persaingan antar stakeholder untuk menunjukkan ganjaran yang diberikannya kepada instansi pemerintah sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik.
  - c. Ketidakfungsian pelayanan publik sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 maka instansi pemerintah menggunakan kekuasaan jabatannya untuk melakukan pemaksaan kehendak kepada stakeholder/konsultan dengan maksud mendapatkan uang dan kepuasan untuk kepentingan pribadi.
  - d. Proses relasi yang terjadi pada kasus gratifikasi pada pengurusan izin lingkungan di instansi pemerintah yaitu mikrostruktur dan makrostruktur
- 2 Hasil penelitian dapat diketahui bahwa mendukung teori Blau dan beberapa proposisi tidak sejalan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange*) khususnya pada kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL. Alasan tidak sejalan untuk kasus yang berada di Instansi Pemerintah KL karena terdapat instansi pemerintah yang tidak mau menerima gratifikasi walaupun pernah

dicoba konsultan untuk diberikan uang lebih tetapi dikembalikan dengan alasan tidak mau menerima gratifikasi karena sebagai pegawai negeri seharusnya memberikan pelayanan prima dan Provinsi KL merupakan provinsi yang baru dibentuk dan pemekaran dari Provinsi KT, sehingga sistem pemerintahannya juga tergolong baru terbentuk. Apabila instansi tersebut berulah atau melakukan pelanggaran maka dengan mudah diketahui oleh Instansi Pusat. Provinsi KL sebagian besar sukunya adalah dayak dan provinsi tersebut juga berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya di serawak dan sabah yang mayoritas juga memiliki suku yang sama yaitu dayak. Dapat diketahui bahwa di Provinsi KL masih belum banyak turis atau wisatawan yang mendatangi daerah tersebut sehingga mayoritas suku dayak masih kental dan belum tercemar dengan suku yang lainnya sehingga masih memegang teguh suku tersebut sehingga apabila melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan dirinya dan masyarakat lain hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di Provinsi KL.

- 3 Konsultan dan instansi pemerintah sama – sama mendapatkan keuntungan dan kerugian dari gratifikasi. Adapun keuntungannya yaitu dapat menjalin hubungan yang baik antara konsultan dan instansi pemerintah, mudahnya mendapatkan izin lingkungan, mendapatkan kepuasan dan mendapatkan penghasilan lebih. Sedangkan kerugiannya yaitu persepsi yang buruk terhadap konsultan dan instansi pemerintah, terciduk KPK, melanggar norma dan mendapatkan kerugian.
- 4 Bentuk gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan dolar, ATM yang berisi uang, peralatan kantor (printer, scanner, fax, laptop, komputer) baju, batik, sajadah, songkok, pulsa, makanan dan tiket, AC, voucher belanja dan beasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Husein. (1983). *Sosiologi Korupsi*. Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta
- Barbalet, Jack. (2018). “*Guanxi as Social Exchange: Emotions, Power and Corruption*”. Dalam *Journal of Retailing*. Vol 52 (5) 934 – 49
- Chiweshe, Manase Kudzai. (2015). *Foucault, power and abuse of authority: Towards a sociology of corruption in Zimbabwe*
- Cooper, Hendi Yogi Prabowo Kathie. (2017). “*Crime Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses*”. Dalam *Journal of Financial Crime*. Vol. 23 1028 – 1062
- David Berry. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Doddy et.al.Wuryanto.(2002). *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung
- Hardiman, Budi. (2009). *Kritik Ideologi*. Yogyakarta : PT Kanius
- Hartanti, Evi. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika
- Hibnu, Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. MediaAksara Prima: Jakarta
- Johnson, D.P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan Robert MZ Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Johson, Doyle Paule. (2008). *Contemporary Sociological Theory An Integrated Multi-Level Approach*. New York : Springer
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Othman, Zaleha. (2014). “*International Conference on Accounting Studies*. Dalam *Journal of Retailing*”. Vol 164 (2014) 248 – 257
- Professor, Associate. (2018). “*Corruption Is a Problem of Political Theory and Practice Anna Vladislavovna Shashkova*”. Dalam *Journal of Retailing*. Vol 14 (3) 143 – 154

- Ribeiro, Haroldo V. dkk. (2018). *The dynamical structure of political corruption networks*
- Ritzer, G. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Rajawali.
- Ritzer, G dan Goodman Douglas J. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. (2010). *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Ritzer, George. Douglas J. Goodman. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ruyadi, Yadi dkk. (2016). *Gratifikasi dan pelayanan sipil : Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sullaeman, Munandar. (2005). *Korupsi Modifikasi Birokrasi dan Perubahan Status*
- Tamtelahitu, Romylus. (2011). *Pertukaran Sosial Antara Bandar Narkoba dan Warga (Studi di Kampung X)" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Pascasarjana Departemen Krimanologi*
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK. (2014 - 2019). *Laporan Tahunan KPK 2014*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi
- Upe, Ambo. (2008). *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana



# Tesis (Nisa) st Semhas

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[sosiologi.fis.unp.ac.id](http://sosiologi.fis.unp.ac.id)

Internet Source

5%

2

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

2%

3

[vdocuments.site](http://vdocuments.site)

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

